

## TAJUK RENCANA

### Pentingnya Mencatatkan Pernikahan

**PERNIKAHAN** bukanlah sekadar sebuah peristiwa bersatunya sepasang lelaki perempuan. Sebagai sebuah 'kabar bahagia' pernikahan perlu disampaikan pada sanak keluarga dan kerabat. Karena itulah di dalam Islam kemudian dikenal adanya anjuran, sunnah melaksanakan *walimatul 'urs*, mengumumkan pernikahan. Dalam arti memberitahukan pada masyarakat bahwa pasangannya itu sudah halal serta memohonkan doa bagi tamu yang hadir diundang. Namun sebagai warga dari negara hukum, pernikahan belum cukup sampai di situ. Artinya, pernikahan yang terjadi perlu dicatatkan pada lembaga yang memiliki kewajiban mencatatnya. Tujuannya, untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan. Mengingat pencatatan perkawinan merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang bersumberkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Artinya, pencatatan dan pembuatan akta perkawinan merupakan suatu kewajiban dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia.

Ironisnya, banyak warga yang menganggap kewajiban mencatatkan pernikahan dan membuat akta perkawinan hanya sebagai kewajiban administratif, bukan penentu sahnyanya pernikahan secara hukum negara. Padahal ketika perkawinan sekalipun dilakukan menurut masing-masing hukum agama atau kepercayaan namun tidak dicatat, dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibatnya, suami isteri dan anak-anak yang dilahirkan tidak memperoleh perlindungan hukum dan ini kelak akan sangat merugikan perempuan dan anak yang dilahirkan.

Lantas bagaimana 'status' pernikahan 192.000 warga Temanggung Jawa Tengah yang tidak tercatat? Benarkah dugaan bahwa sebagian adalah pernikahan siri dari warga yang masih muda? (KR, 11/12).

Temuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupa-

ten Temanggung ini menarik dicermati dan ditindaklanjuti bahkan oleh kabupaten/kota lain. Karena hampir pasti, di seluruh wilayah di Indonesia, realita ini terjadi. Namun benarkah faktor penyebab adalah semata dokumen pernikahan hilang, memang tidak memiliki dokumen dan nikah siri atau sistem tidak bisa mengadopsi surat pernikahan yang dikeluarkan saja?

Agaknya Disdukcapil perlu lebih teliti dan jeli dalam mengulik faktor penyebab. Mengingat acap terjadi di masyarakat pernikahan tidak dicatatkan – dan hanya menikah secara agama – karena ada sebab lain : tidak ingin kehilangan uang pensiun suami/istri. Sebab pasangan tersebut, baik lelaki atau perempuannya adalah duda/janda karena ditinggal mati istri/suami yang aparat sipil negara (ASN) serta memiliki uang pensiun. Dengan tanpa mencatatkan pernikahan (baru) tersebut ia tetap berstatus janda/duda, tidak kehilangan 'hak' pensiun yang ditinggalkan suami/istri yang telah meninggal.

Apa artinya? Negara masih tetap membayarkan uang pensiun suami/istri yang telah almarhum sementara duda/janda tersebut telah menikah kembali. Mungkin saja, uang pensiun duda/janda itu tidak banyak bila dilihat perorang. Namun ketika banyak yang melakukan demikian dan terjadi bertahun-tahun, berapa uang rakyat yang telah mereka habiskan?

Nilah pentingnya mencatatkan pernikahan. Maka sosialisasi untuk edukasi pentingnya mencatatkan pernikahan, perlu ditingkatkan. Karena selain mencatatkan pernikahan jelas memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak juga akan 'menyelamatkan' uang rakyat atau uang negara yang tidak sedikit.

Upaya mengulik lebih dalam bukanlah membongkar aib seseorang. Substansinya jelas, menyelamatkan perempuan, anak dan juga uang rakyat. Mungkinkah problema ini bisa diselesaikan dengan administrasi kependudukan yang tertib? □

# SDGs Desa pada Transmigrasi

## Azsep Kurniawan

**TUJUH**PULUHSATU tahun transmigrasi telah mengabdikan pada negeri. Bukan waktu singkat sejak peristiwa keberangkatan 23 KK (77 jiwa) masyarakat Sukadana, Bagelen Jawa Tengah menuju Gedong Tataan Lampung, 12 Desember 1950. Peristiwa akhirnya diperingati sebagai Hari Bakti Transmigrasi setiap 12 Desember.

Data Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (2021) menyatakan bahwa transmigrasi telah mendorong terbentuknya 1.529 desa definitif, 454 ibu kota kecamatan dan 115 ibu kota kabupaten. Bahkan ada dua ibukota provinsi baru berasal dari pemukiman transmigrasi yaitu Mamuju ibukota Sulawesi Barat dan Tanjung Solor ibukota Kalimantan Utara.

Transmigrasi turut membenahi kehidupan masyarakat baik dari aspek kewargaan dan kewilayahan. Pada aspek kewargaan, transmigrasi telah memberikan peningkatan kesejahteraan transmigran melalui pemberian kesempatan kerja. Juga akses mengolah lahan, pemberian bantuan modal dan sarana prasarana produksi. Pada aspek pendidikan, transmigrasi telah membekali transmigran dengan pelatihan sebelum dan setelah penempatan.

Pada aspek kewilayahan, transmigrasi telah membangun 1.226,9 km jalan, 2.156,5 m jembatan, 9.750 unit pemukiman transmigrasi, 2.248 unit sarana air bersih dan masih banyak lainnya. Ini berdasar Laporan Capaian Empat Tahunan Kemendesa PDT Transmigrasi 2015-2019. Artinya prasyarat agar kawasan bisa maju sudah terpenuhi secara bertahap.

**Kelembagaan Desa**

Relevan dengan kedua aspek tersebut, maka tema peringatan Hari Bakti Transmigrasi Ke-71 tahun ini adalah Transmigrasi Wujud Nyata Implementasi SDGs Desa untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa merupakan pembedaan SDGs (global) dengan menambahkan point ke-18 yaitu kelembagaan desa di-



KR-JOKO SANTOSO

SDGs Desa bisa menjadi alat pindai apakah masih ada yang tertinggal dalam pembangunan transmigrasi.

Ada keterkaitan erat antara transmigrasi dan desa. Karena selama ini pemukiman transmigrasi berada di wilayah desa definitif. Juga banyak pemukiman transmigrasi berkembang menjadi desa definitif baru. Dan kini transmigrasi terus berbenah. Salah satu isu penting saat ini yang juga mendukung implementasi SDGs Desa adalah revitalisasi kawasan transmigrasi. Revitalisasi kawasan transmigrasi ini mendukung SDGs Desa no 8, 9, 10 dan 11 (pertumbuhan ekonomi desa merata, Infrastruktur dan ekonomi desa sesuai kebutuhan, desa tanpa kesenjangan, kawasan pemukiman desa aman dan nyaman).

Menurut Menteri Desa PDT Transmigrasi, sampai 2024 tidak ada lagi penambahan kawasan transmigrasi

baru, namun pada revitalisasi kawasan. Ada 52 kawasan transmigrasi yang menjadi prioritas nasional sesuai RPJM Nasional tahun 2020 – 2024. Revitalisasi bertujuan untuk perbaikan infrastruktur, ekonomi, pengembangan sosial budaya di kawasan transmigrasi.

**Kemitraan**

Peningkatan pertumbuhan ekonomi bisa dilakukan dengan kemitraan. Kemitraan ini untuk memastikan produk-produk yang dihasilkan transmigran bisa diserap pasar. Kalau dulu biasanya penempatan transmigran di baru kemudian dipikirkan pasarnya, maka sekarang polanya harus dibalik. Sebelum penempatan, disiapkan dulu pasarnya baru kemudian penempatan.

Pengembangan sosial budaya di kawasan transmigrasi berfokus pada bagaimana mensinergikan antara transmigran penduduk asal (TPA) dan transmigran penduduk setempat (TPS) baik dalam budaya kerja, adat istiadat dan kearifan lokal yang ada. Maklum kadang timbul resistensi dari TPS terhadap pendatang. Komunikasi dua arah bisa menjaga integrasi sosial yang telah dibangun.

Sebagai sebuah program – bukan proyek – transmigrasi masih bisa beradaptasi dengan kondisi sekarang. Meski sekarang transmigrasi itu urusan pilihan bagi daerah. Transmigrasi terus membangun negeri dan menjadi bukti implementasi SDGs Desa. □

*\*) Azsep Kurniawan, Fungsional PSM Kemendesa PDT Transmigrasi*

### Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

## PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik  
Naskah dikirim Email atau WA  
@ [pikiranpembaca@gmail.com](mailto:pikiranpembaca@gmail.com) 0895-6394-11000  
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat  
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

### Tegakkan Aturan Sekolah Ramah Anak

**PENGELOLA** satuan pendidikan harus menegakkan aturan sekolah ramah anak. Berbagai kasus kekerasan di kalangan siswa atau pelajar baik fisik, psikis, verbal, perundungan, penelantaran, eksploitasi anak, dan kekerasan seksual yang terjadi belakangan ini sangat mengkhawatirkan. Peristiwa tersebut harus menjadi perhatian bersama pengelola satuan pendidikan, pemerintah daerah, masyarakat, dan orangtua.

Di antara beberapa hal yang dapat menjadi penyebab kekerasan pada anak di masa pandemi, khususnya dari lingkup keluarga adalah faktor ekonomi. Problem keuangan yang dihadapi orangtua saat pandemi ini sering memicu emosi yang kemudian dilampiaskan sebagian orangtua kepada anak. Kesulitan yang dialami anak saat pembelajaran daring yang tidak setiap orangtua siap dan mampu mendampingi juga andil dalam menyebabkan kekerasan pada anak.

Orangtua sebagai pendidik utama dan pertama harus mempersiapkan anak untuk memasuki lembaga pendidikan, mempersiapkan anak untuk berinteraksi dengan dunia luar sekaligus menjaga diri terhadap siapapun. Bekali anak dengan ilmu bela diri dan sikap selalu waspada terhadap segala sesuatu yang belum dikenal.

Salah satu cara meminimalisir terjadinya kekerasan pada anak adalah menguatkan simpul-simpul keluarga dengan sekolah juga dengan penguatan

antara orangtua dan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan harus menjadi tempat yang aman bagi siswa untuk memperoleh pendidikan. Jangan lagi ada kasus kekerasan di satuan pendidikan dalam bentuk apapun. Anak ingin meraih pendidikan terbaik harus didukung dan diwujudkan bersama. Oleh karena itu, pengelola satuan pendidikan harus menegakkan aturan sekolah ramah anak. Tidak diperkenankan lagi ada kekerasan dalam bentuk apapun sebagai relasi kuasa baik dari kepala sekolah, guru, senior, dan teman sebaya. Kompetensi kepribadian, sosial, pedagogi, dan profesional sebagai guru dan pendidik harus dihidarkan di lingkungan sekolah.

Setiap lembaga pendidikan sebaiknya menciptakan lingkungan yang ramah anak, baik dalam keluarga dan sekolah untuk keberlangsungan pendidikan yang aman dan kondusif. Pemerintah terutama Kementerian Penderdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebaiknya menyiapkan standar lembaga perlindungan khusus ramah anak. Lembaga tersebut melakukan upaya secara massif pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan. Dengan kerja sama dan kepedulian yang baik antara orangtua, sekolah dan stakeholder terkait akan dapat menekan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. □

*\*) Sri Sunarsih, Kepala SDN Kejambon 1, Ngemplak, Sleman.*

# Digitalisasi Bank Daerah

## Suparmono

**PADA** presidensi G20 Indonesia yang bertema *recover together, recover stronger* ditemukan fenomena bahwa menguatnya kinerja ekonomi global khususnya negara maju, diikuti dengan naiknya tekanan inflasi. Kondisi ini juga mendorong perubahan kebijakan yang lebih ketat, sehingga pemulihan yang tidak merata berpotensi semakin parah. Dunia perbankan pun tidak terlepas dari volatilitas global ini. Tuntutan perubahan yang cepat untuk bertahan di masa pandemi bahkan meraih peluang baru. Peluang baru yang dapat dimanfaatkan bank adalah terjadinya perubahan pola hidup dan pola transaksi dari konvensional menjadi digital.

Tren pembayaran digital yang meningkat selama pandemi membuat bank sentral mempertimbangkan adanya ancaman jangka panjang terhadap uang kertas yang selama ini mereka suplai. Bisa dibayangkan jumlah konsumen digital di Asia Tenggara diprediksi bisa mencapai 350 juta hingga akhir tahun ini. Kemudian jumlah pembeli online di Asia Tenggara mencapai 380 juta pada 2026. Dari jumlah tersebut, Populasi konsumen digital Indonesia diprediksi tumbuh sekitar 15%, dari 144 juta pada 2020 menjadi 165 juta pada akhir 2021. Hingga Oktober 2021, transaksi uang elektronik tumbuh 55,54% *yoy* menjadi Rp 29,23 triliun.

Menurut laporan We Are Social dan Hootsuite (2021), pengguna *mobile phone* di Indonesia 98,3%, pengguna gadget seperti laptop, tablet, dan smartwatch sebesar 74,7%, 18,5%, dan 13,3%. OJK menganggap bahwa perkembangan ini merupakan peluang bagi bank yang dapat merespons dengan digitalisasi perbankan. Tak hanya transaksi uang elektronik yang mengalami peningkatan fantastis, transaksi *digital banking* juga

mengalami kenaikan. Pada periode yang sama, nilai transaksi digital banking meningkat 63,31% *yoy* menjadi Rp 3.910,25 triliun.

Tantangan dan peluang tersebut juga dihadapi bank daerah yang operasional dan target pasarnya juga secara lokal. Menjadi tantangan tersendiri bagi bank daerah dalam merespons perubahan ini menuju bank digital. Diperlukan sumber daya yang memadai, tuntutan investasi teknologi yang tinggi, serta perlu penyesuaian terhadap target demografi pasar.

**Garda Depan**

Bank BPD DIY sebagai bank daerah, menjadi garda depan dalam penerimaan daerah. Adaptasi pencapaian penerapan teknologi, mengembangkan inovasi produk, dan perluasan channel pembayaran merupakan suatu keniscayaan.

Mensinergikan dengan pemerintah daerah DIY yang menjadi mitra utama sekaligus shareholder yang saat ini telah melakukan digitalisasi transaksi. *Cash Management Sistem* (CMS) dan digitalisasi penerimaan daerah semakin memperkuat BPD DIY mentransformasi diri kearah bank digital tersebut. Pelayanan PBB, pajak daerah, pajak kendaraan bermotor (e-Samsat), dan e-Retribusi. Transaksi tersebut dapat dilakukan melalui Mobile Banking Bank BPD DIY (BPD DIY Mobile), Laku Pandai, ATM, EDC, QRIS. Selain itu Bank BPD DIY bekerjasama dengan Fintech, e-commerce merupakan bentuk yang harus dilayani.

Keyakinan yang memperkuat BPD DIY untuk mampu merespons perubahan cepat pada kondisi pandemi telah terbukti dengan diraihnya berbagai predikat dan penghargaan yang relevan. Bank Penerima Setoran-Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) Terbaik 2020, The Best Cooperation Programs to Implement Regional Government Information System (SIPD) 2021, The Best Financial Performance During September 2020, Bank dengan predikat 'Sangat Bagus' 25 tahun berturut-turut. Selain itu, BPD DIY juga menjadi Pemenang TOP BUMD Awards 2021 dan Indonesia TOP Banks Award 2021, serta Unit Usaha Syariah dengan Predikat 'Sangat Bagus' untuk Kinerja Tahun 2020 – Infobank Sharia Awards 2021. □

*\*) Dr Suparmono MSi, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Peneliti Senior Sinergi Consulting, dan Pengurus ISEI Yogyakarta*

## Pojok KR

Rektor Unsoed lakukan pengusutan dugaan pelecehan di BEM  
-- Bikin jera pelaku pelecehan di kampus!  
\*\*\*  
Cegah stunting dengan 8.000 HPK  
-- Gerak cepat, cegah stunting sejak dini  
\*\*\*  
Koperasi tidak sehat harus merger  
-- Perlu jelas, merger dengan siapa?  
*Berabe*

## Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSC. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

**Pemimpin Umum:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussenahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afriati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

**Pemimpin Perusahan:** Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langgan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

**Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: [iklan@kr.co.id](mailto:iklan@kr.co.id), [iklankrky2@yahoo.com](mailto:iklankrky2@yahoo.com), [iklankrky13@gmail.com](mailto:iklankrky13@gmail.com).

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu' Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) Rp 12.000,00/baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300% dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

**Alamat Perceatikan:** Jalan Raya Yogyakarta - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab peretakan

**Alamat Homepage:** <http://www.kr.co.id> dan [www.krjogja.com](http://www.krjogja.com). **Alamat e-mail:** [naskahkr@gmail.com](mailto:naskahkr@gmail.com). **Radio:** KR Radio 107.2 FM.

**Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

**Perwakilan dan Biro:**  
**Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.  
**Wartawan:** H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.  
**Semarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP.  
**Banyumas:** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Kepala Biro: Driyanto.  
**Klaten:** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro: Sri Warsiti.  
**Magelang:** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro: Drs M Thoha.  
**Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd Kepala Biro: Asrul Sani.  
**Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.